



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TALONTAM BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019-2025

Indika Zuhri Maulana

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : dikazm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025. Teknik penarikan sampel menggunakan metode Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 42 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 menghasilkan nilai rata-rata total 125 berarti berada pada interval Cukup baik, Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025, dengan keseluruhan indikator yang diujikan yakni tahapan Persiapan pemilihan kepala desa, Tahapan Pencalonan kepala desa, Tahapan Pemungutan Suara, Penetapan keseluruhan sudah Cukup baik.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa

Abstract

This research was carried out in Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The aim of this research is to find out how the village head is elected in Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2025. The formulation of the problem in the research is How to Selection of Village Heads in Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2025. The sampling technique uses the Simple Random Sampling method, namely taking sample members from the population randomly without paying attention to the strata in the population, where the number of samples for this research was 42 people. The data analysis used is quantitative descriptive, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing it, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the questionnaire distribution show that the Election of Village Heads in Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2025 produced a total average score of 125, meaning it was in the quite good interval, as well as observations in the field which showed that the Election of Village Heads in Talontam Benai Village was quite good. Benai District, Kuantan Singingi Regency, 2019-2025, with all the indicators tested, namely the Preparation Stage for Village Head Election, Village Head Nomination Stage, Voting Stage, Overall Determination is Good Enough.

Keywords : Village Head Election



1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan komisial, sebagai gagasan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta prilakunya. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu tonggak yang paling penting dalam demokrasi ialah melalui pemilu baik pemilihan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi. Rakyat merupakan aktor politik yang menentukan berhasil atau tidaknya hasil pemilihan umum tersebut. Salah satu ciri-ciri demokrasi adalah menyelenggarakan pemilihan umum atau pesta rakyat sehingga perwakilan atau pemimpin yang dipilih menjalankan roda pemerintahan. Ruang lingkup demokrasi terkecil diantara pemilihan kepala pemerintahan ialah pemilihan kepala desa.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 2 masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan peristiwa politik ditingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan- tekanan yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi ditingkat lokal seperti pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ada di daerah riau ditingkat kabupaten ialah kabupaten Kuantan singingi yang dilaksanakan secara serentak. Pemilihan



kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Perbup Kuantan singingi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah yang berada dibawah pemerintah kabupaten, sehingga mutlak untuk dilaksanakan otonomi desa secara berkelanjutan untuk tercapainya rasa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Di Kabupaten Kuantan singingi, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Perbup Kuantan singingi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pilkades Serentak Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2025, yang dilaksanakan tanggal 11 September 2019, Pilkades tahun ini di ikuti sebanyak 342 Calon Kepala Desa yang bersaing untuk memperebutkan 94 kursi di desa Se-Kuantan Singingi.

Sementara itu di wilayah di kecamatan Benai dilaksanakan pilkades serentak di enam desa, antara lain adalah desa Talontam Benai dimana di desa ini diikuti oleh 3 orang yang menjadi calon kandidat dalam pemilihan kepala desa. Setiap Calon Kepala Desa bersaing secara ketat dengan mengikuti setiap seleksi dimulai dari seleksi penelitian berkas calon kades, seleksi administrasi balon dan wawancara kesetiaan terhadap pancasila dan UUD 1945. Dari proses seleksi ini, BPD menetapkan 3 calon Kepala Desa yang berhak ikut dalam pencalonan. Setelah pengumuman penetapan calon kepala desa, yang harus dilakukan oleh ketiga calon adalah membuat visi misi atau program kerjanya selama enam tahun kedepan. Tentu hal ini nanti nya akan dijadikan tolak ukur masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya. Dalam sistem pemerintah desa, kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat serta dapat menjadi kepala desa dengan jumlah perolehan suara terbanyak dalam pemilihan. Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan untuk memilih pemimpin Kepala Desa yang menjadi pilihannya. Namun kenyataannya dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019 ini cukup banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi atau memilih menjadi golongan putih (Golput), yang mana dari 827 Daftar Pemilih, hanya 744 orang yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa, dan 83 orang yang tidak ikut memilih atau berpartisipasi, atau jika dipersentasekan 11% masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Talontam tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan Penjelasan diatas terlihat jumlah masyarakat yang tidak partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Talontom, untuk itu peneliti mengambil judul penelitian : “Analisis Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerja sama yang di dasarkan pada esendi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).



Menurut Sondang P Siagian, Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012 : 9).

Menurut Soejarno Soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*Knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum (dalam Syafie, 2010 : 3)

Istilah politik berasal dari bahasa Inggris *publik yang* berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya, dalam Bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta tersebut sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja pelayanan rakyat (dalam Inu Kencana Syafie, 2010 : 16).

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Syafie, 2010 : 14).

Menurut Sondang p. Siagin, Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (dalam Syafie, 2010 : 14)

Secara terminologi Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dan penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya. (Ali, 2015 : 19)

Menurut Dimock Administrasi Negara adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengertahuanyang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan. Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilaukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya (dalam Anggara, 2012 : 134).

Menurut Thoha (mengemukakan ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik (dalam Anggara 2012 : 147).

Adapun ciri-ciri Administrasi negara yang dikemukakan oleh Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro sebagai berikut (dalam Pasolong 2014 : 21):

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
- b. Meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.

Menurut Pfiffner dan Presthus memberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut (dalam Syafie 2010 : 31):

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan



teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap jumlah orang.

Sedangkan Menurut Chander dan Plano mengemukakan bahwa administrasi publik (Negara) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengola keputusan-keputusan dalam publik (dalam Keban 2014 : 3).

Ciri-ciri Administrasi Negara menurut Thoha adalah sebagai berikut (dalam Anggara, 2012 : 143) :

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgent dibanding dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi yang diberikan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika tidak disegerahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya maka tidak akan jalan.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semimonopoli.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi Negara dan Administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legalitas dari administrasi negara tersebut.
- d. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh Administrasi Negara ditentukan oleh ras pengabdian kepada masyarakat umum.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu (dalam Anggara, 2012 : 144) :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

2.1.2 Teori Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunandesanya. Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dan 2, yakni :

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa,



BPD dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang dilaksanakan bebas, umum dan adil yang selanjutnya juga di atur dalam undang-undang dan peraturan Menteri dalam negeri. Pemilihan kepala desa secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan (Permendagri Nomor 112 tahun 2014)
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan

Adapun tahapan pemilihan kepala desa adalah:

- a. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa Setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa maka ketua badan permusyawaratan desa (BPD) mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat kalau masa atau tahapan penjurian calon kepala desa di desa telah dilaksanakan dan dibuka ,jadi bagi penduduk desa yang berkeinginan menjadi calon kepala desa dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan kepala desa.

Kemudian panitia pemilihan kepala desa menetapkan cara penjurian bakal calon kepala desa, dimana tahap tersebut menurut pasal 11 (sebelas) peraturan daerah tersebut diatas menyatakan:

1. Tahapan ini dikatakan tahap penjurian, dimana panitia menunggu serta mencari penduduk yang berkunjung menjadi calon kepala desa, masa penjurian ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
2. Penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijurkan bakal calon kepala desa sebanyak 3 orang, maka penjurian diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
4. Dalam hal sampai dengan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) orang bakal calon kepala desa maka penjurian bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, setelah masa yang ditentukan berakhir maka panitia akan masuk kepada tahap penyaringan, dimana tahap penyaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.

Kemudian tahap selanjutnya apabila bakal calon kepala desa telah berhasil diperoleh, maka dilakukan atau dilanjutkan kepada tahap seleksi atau penyaringan bakal calon kepala desa, seleksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan ujian penyaringan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tersebut diatas, kemudian berdasarkan hasil



penyaringan tersebut, maka akan diperoleh bakal calon kepala desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir sebagian umat manusia dimana-mana di muka bumi ini telah memahami dan menghayatinya, dengan perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa di dunia sehingga berbicara mengenai pengertian demokrasi sesungguhnya tidak asing lagi bagi setiap warga masyarakat terutama kaum elit.

Hak masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut.

1. Meminta dan mendafatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: a. Kepala Desa b. Perangkat desa c. Anggota badan permusyawaratan desa, dan d. Anggota lembaga kemasyarakatan.

2.1.3 Teori /Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabungkan menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti melatih (Syafiie, 2010 : 48).

Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia (Syafiie, 2010 : 49).

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Donni & Agus, 2013 : 29).

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ialah (dalam Zulkifli & Moris, 2014 : 47):

- a. *Planning* (perencanaan),
- b. *Organizing* (pengkoordinasian),
- c. *Actuating* (pemberian dorongan), dan
- d. *Controlling* (pengawasan).

Dari penjelasan beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan secara keseluruhan yang berkaitan dan saling diorganisir dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1)



Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan, 2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2010 : 2).

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).
3. Pengarahan
Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
10. Kedisiplinan



Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya (dalam *Mangkunegara*, 2010 : 07).

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Terry, 2010 : 16).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2012 : 1).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan



lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi

2.1.4 Teori Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip dasar dari *goodgovernment*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi pertama pada mengawali reformasi 1998. Partisipasi muncul dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dari *capere* yang artinya mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Ketika digabungkan dari edua kata itu menjadi “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi adalah mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara (Suharno, 2014:102-103).

Partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting disuatu demokrasi. Partisipasi politik adalah ciri khas dari modernisasi politik. Ada juga keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dan mempengaruhi warga negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007:151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan tentu dipelopori oleh berbagai faktor. Hamlan Surbakti (2008:140) berpendapat bahwa ada dua *variable* penting yang mengakibatkan banyak kurangnya tingk keterlibatan politik seseorang. Pertama, aspek kepekaan politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud pada kepekaan politik merupakan kepekaan hak dan kewajiban rakyat. Contohnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban masyarakat dan lain-lain. Kedua, mengenai bagaimana penilaian serta pujian kepada keputusan pemerintah dan eksekutornya pemerintah. Sementara itu masih ada faktor yang independen (*variable independen*). Artinya bahwa kurangnya kedua faktor itu diakibatkan oleh faktor-faktor lain, seperti status masyarakat, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status masyarakat yaitu kedudukan seseorang beepatan pada kekeluargaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi status ekonomi yaitu kedudukan seseorang pada bergagai rakyat, berpatokan pada pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang banyak diperkirakan tidak hanya mempunyai ilmu politik, akan tetapi memiliki kemauan serta memfokuskan pada politik dan keyakinan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145)

Yang berikutnya lagi Myron Weimer mengemukakan pendapatnya bahwa keterlibatan politik diakibatkan oleh berbagai hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1) Modernisasi

Modernisasi diberbagai bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industry, meningkatkan arus perpindahan penduduk, peningkatan kualitas baca tulis, memperbaiki pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.



- 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas pada struktur kelas baru itu sebagai konsekuensi dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era industrialisasi dan modernisasi.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modernisasi pemikiran-pemikiran cemerlang seperti nasionalisme, liberalisme, konsekuensinya tuntutan-tuntutan untuk keterlibatan pada pengambilan suara.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai tujuannya dibuat dengan cara mencari dukungan masyarakat yang banyak.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang sekian luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis para pemimpin ini biasanya menarik perhatian sehingga timbulah tuntutan-tuntutan organisasi untuk melibatkan diri yang dipelopori dengan pembuatan kebijakan politik

Gabriel A. Almo (2011:57-70) Keterlibatan politik konvensional merupakan macam-macam keterlibatan yang umum dan lazim didapatkan. Ada juga rincian jenis keterlibatan politik konvensional yaitu:

1. Pemberian Suara
Proses pemberian suara disebut keterlibatan politik di sistem demokrasi sudah menjadi kebiasaan yang sering dipakai, sebagai tolak ukur ikut andilnya warga di semua kebijakan politik disebut negara
 2. Diskusi Politik
Pada sebuah negara demokrasi, diskusi politik sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi di kalangan politikus hingga di tingkat warga desa, untuk menyikapi suatu keputusan politik pemerintah ataupun menukar pikiran fenomena-fenomena yang terjadi di ruang publik yang berkaitan dengan politik.
 3. Kegiatan Kampanye
Proses kampanye di semua pemilihan umum sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dan dimuat di aturan penyelenggara pemilihan umum baik pemilihan ditingkat pusat hingga pemilihan di tingkat pedesaan.
 4. Bergabung Dengan Kelompok Kepentingan
Masyarakat yang berpartisipasi membuat dan bergabung di organisasi kepentingan tersebut. Kepentingan yang difokuskan di hal ini bisa saja kepentingan akan politik atau kepentingan lainnya yang fundamental mendatangkan sisi positif atau berguna bagi dirinya dan bagi kelompoknya. Tetapi seperti yang sudah dipaparkan di atas, tentunya grup kepentingan ini juga harus bisa dipakai secara umum oleh warga dan taat terhadap konstitusi negara yang berkaitan dengan peraturan negara.
 5. Bergabung Dengan Partai Politik
Melibatkan diri dengan partai politik merupakan hal yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang pingin menjadi seorang pemimpin karena partai politik, salah satu komponen terpakai di sistem demokrasi dan dipakai sebagai mobilitas politik untuk terwujud aspirasinya.
- Komunikasi Individu Dengan Pejabat Politik Atau Administratif



Komunikasi individu dengan administratif. Hal seperti ini sah-sah saja dilakukan asalkan tidak melanggar aturan yang ada dan asalkan komunikasi tersebut dianggap bisa diterima secara umum.

Selain itu hematnya Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (2000:168) memberikan alasan bermacam-macam mengenai keterlibatan individu yaitu :

1. Berkenaan dengan menarik perhatian politik yang diberikan. Milbrath mengemukakan pendapatnya tentang kejujuran dan kepedulian dari individu untuk menarik perhatian politik lewat kontak-kontak individu, kelompok dan lewat media massa akan mendapatkan penyebab bagi keterlibatan seseorang pada agenda politik.
2. Berkenaan dengan karakteristik oknum masyarakat. Bisa dikatakan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin dan kepercayaan (agama). Karakter individu berpatokan pada faktor-faktor tersebut mempunyai efek yang relatif lumayan banyak terhadap keterlibatan politik.
3. Yaitu menyingkat sifat dan sistem partai dimana seseorang itu hidup. Individu yang semangat di Negara yang demokrasi, partai-partai politiknya cenderung mencari support dari masyarakat pada umumnya dan memperjuangkan kebutuhan banyak orang, sehingga oknum oknum masyarakat cenderung keikutsertaan dalam politik.
4. Yaitu adanya ketidaksamaan regional. Ketidaksamaan ini adalah aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap ketidaksamaan watak dan perilaku seseorang. Dengan ketidaksamaan regional itu juga yang mengsupport ketidaksamaan tingka laku politik dan keterlibatan politik

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 sudah cukup baik terlihat pada tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan



Singingi Tahun 2019-2025 adalah Cukup Baik karena berada pada Interval 85 – 126, dan memang pada tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 memang cukup baik, mulai dari pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatanyang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak; laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; dan pengajuan rencana biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, hingga Penetapan daftar pemilih.

Tahapan Pencalonan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 adalah Cukup baik karena berada pada Interval 86 – 126, dan memang pada tahapan Pencalonan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 memang cukup baik, mulai dari Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari melalui pengumuman dan/atau pamflet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya, Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, hingga Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, semua telah dilakukan dengan cukup baik tentunya berdasarkan aturan perundang-undangan.

Tahapan Pemungutan Suara Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 adalah cukup baik karena berada pada Interval 86 – 126, dan memang pada Tahapan Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 memang baik, mulai dari Proses pencoblosan/ pemberian hak suara pemilihan oleh masyarakat, Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara hingga Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak berjalan dengan tertib aman dan lancar.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025 menghasilkan nilai rata-rata total 125 berarti berada pada interval Cukup baik, Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baik Pemilihan Kepala Desa di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2025, dengan keseluruhan indikator yang diujikan yakni tahapan Persiapan pemilihan kepala desa, Tahapan Pencalonan kepala desa, Tahapan Pemungutan Suara, Penetapan keseluruhan sudah Cukup baik.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Cholisin, dkk, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political. Science)*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi. Pustakaraya Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Gabriel Almond. 2011. *Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasibuan, Malayu S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi. Aksara
- Keban, Yeremias, T, 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga), Gava Media,. Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakary
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa. Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press
- Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis*,. Surabaya: ITSPers
- Pasolong Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Priansa, Donni Juni dan Garnida, Agus. 2013. *Manajemen perkantoran*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sondang P, Siagian. 2002, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ulbert Silalahi, 2011, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Zulkifli, dan Yogia Moris Adidi, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Perbup Kuantan singingi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa